BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok masih belum merata, Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok disalurkan untuk masyarakat miskin, dimana kriteria miskin yang ditetapkan oleh Desa Pojok yaitu pendapatannya kurang dari Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya. Namun pada realitanya masih adanya masyarakat yang tergolong mampu namun tetap mendapatkan bantuan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam praktik penyaluran BPNT di Desa Pojok masih kurang tepat sasaran, dimana masih adanya masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan tersebut. Jenis komoditas yan diperoleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pojok yaitu beras seberat 15 Kg, telur 1 Kg, Kacang-kacangan 0,5 Kg. Daging 1 Kg, dan buah-buahan 1 Kg.
2. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Pojok masih belum memenuhi syarat–syarat dalam memenuhi komponen yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yaitu masih belum tersedianya e-warong tempat menyalurkan bantuan di Desa Pojok sehingga penerima bantuan mengambil/membelikan bantuan di e-warong yang berada di Desa Kepuhrejo yang jaraknya cukup jauh. Kendala yang muncul di lapangan terkait data penerima BPNT yaitu terkait pemerataan

program, yakni ada yang masih belum sejahtera namun tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang cukup sejahtera mendapatkan bantuan. Hal ini bisa disebabkan karena sebagian warga enggan untuk mencatatkan data kependudukan yang terbaru ke kantor pencatatan sipil agar mudah dalam melakukan pendataan. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksana teknis program BPNT khususnya bagi Pendamping BPNT. Ketua Pelaksana BPNT di desa Pojok rutin melakukan evaluasi dan validasi setiap saat terkait dengan keadaan yang terjadi pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Segala upaya telah dilakukan agar kendala dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan bisa teratasi. Akan tetapi konsekuensi berkutat di bidang sosial maka tidak sedikit kemungkinan akan menemukan suara-suara yang tidak mengenakkan dari masyarakat umum tekait dengan pembagian bantuan BPNT ini. Dalam realita di lapangan masih dijumpai adanya kecemburuan sosial karena kurang adanya pengetahuan dan pengertian masyarakat terkait bantuan BPNT. Bahwa terdapat prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima BPNT. Namun masyarakat masih acuh dan tidak ingin tahu terkait hal tersebut, karena sebagian besar masyarakat hanya ingin tahu jika ada yang mendapat bantuan maka mereka juga harus dapat.

3. Penyaluran BPNT sudah sesuai dengan konsep fiqih siyasah dusturiyyah dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat, untuk sedikit mengurangi pengeluaran

rumah tangga. Pelaksanaan program BPNT di desa Pojok masih belum sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam islam dikarenakan penyaluran bantuan yang masih belum merata. Dilihat dari perspektif keadilan bahwa masyarakat miskin ialah masyarakat yang berhak menerima Bantuan Pangan Nontunai dari pemerintah namun, pada realitanya masih ada masyarakat yang cukup sejahtera juga menerima bantuan tersebut, dari perspektif distribusi bahwa penyaluran Bantuan Pangan Nontunai tersebut telah melanggar prinsip keadilan.

4. Kendala yang dihadapi dan solusinya pada proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung kendalanya yaitu; Sulitnya menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang benar-benar miskin atau tidak mampu dalam menghadapi sulitnya menentukan penerima BPNT pemerintah desa Pojok harus melakukan pembaharuan administrasi data masyarakatnya, Tidak memadainya fasilitas pembelian bahan pangan di Desa Pojok mengakibatkan warga desa Pojok harus mengambil atau membelikan bantuan di Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang mana jaraknya cukup jauhdalam hal ini Pemerintah Desa Pojok harus melakukan sosialisasi dengan pedagang eceran untuk bagaimana menjadi e-warong tempat pembelian bahan pangan, tentunya sosialisasi ini dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah desa Pojok dan bank penyalur

B. Saran

1. Bagi Kementerian Sosial dengan adanya program Bantuan Pangan Nontuani ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Karena dalam praktiknya masih banyak bantuan sosial dari pusat yang belum menjangkau masyarakat tidak mampu yang benar-benar membutuhkan sedangkan penerima yang mampu justru mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Begitupula dengan BPNT juga terdapat sedikit kemungkinan terjadi ketidak tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan. Agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pendataan calon penerima bantuan.
2. Bagi pemerintah desa Pojok kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung untuk lebih selektif dalam menentukan KPM calon penerima Bantuan Pangan Nontunai untuk meminimalisir kesenjangan dalam masyarakat.